

Jaksa Dapat Informasi Yayasan ACT Masih Galang Dana dan Investasi

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendapat informasi bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih tetap beroperasi mengumpulkan uang dan investasi. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) RI diketahui sudah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022. Izin dicabut karena ada pelanggaran yang dilakukan ACT.

Kejati DKI melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) membuat permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Hasil konfirmasi saya ke teman-teman di Kejari Jakarta Selatan, berkenaan dengan permohonan ke ACT itu informasi yang diperoleh teman-teman, ACT itu disinyalir masih melakukan operasi pengumpulan dan masyarakat dan ini investasi juga," kata Kasi Penkum Kejati DKI Ade Sofyansyah kepada wartawan, Minggu (11/9).

"Jadi atas dasar itu, kemudian teman-teman (bidang

Perdata dan Tata Usaha (Kejari) Jakarta Selatan melakukan terobosan melakukan permohonan ke Pengadilan Jakarta Selatan itu," ujarnya.

Ade menyebut permohonan itu untuk meminta Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) mengaudit ACT. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan Yayasan ACT.

"Tujuannya untuk meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap ACT, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan itu," tuturnya.

Ade menyebut permohonan itu sudah didaftarkan pada Selasa (6/9) lalu. "Iya (daftar permohonan) Selasa, 6 September," ungkap Ade.

Kemensos Cabut Izin ACT

Kementerian Sosial (Kemensos) RI diketahui sudah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022. Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT. ● han

2 Polhukam

FOTO:ANT



LAYANAN PEMBUATAN PASPOR KJRI SYDNEY DI ATAS KRI BIMA SUCI
Staff Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) Sydney merekam wajah pemohon paspor yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Sydney, Australia di atas Geladak KRI Bima Suci-945 di Dermaga Royal Australian Naval Base HMAS Kuttabul Potts Point Sydney, New South Wales, Australia, Minggu (11/9). KJRI Sydney membuka layanan pembuatan dan perpanjangan paspor "walk in" bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Sydney, Australia di atas KRI Bima Suci-945.

Aroma 2024 dalam Pelengseran Ketum PPP yang Direstui Pemerintah

Pemecatan Suharso Monoarfa sebagai Ketum bukan hanya soliditas internal PPP yang dipertaruhkan. Soliditas KIB, koalisi PPP, PAN dan Golkar, juga terancam.

JAKARTA (IM) - Kedudukan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi dilucuti dan berpindah ke tangan Muhammad Mardiono. Meski ada silang pendapat di internal PPP, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) tak butuh waktu lama mengesahkan kepemimpinan Mardiono, sebagai .

Laoly membenarkan telah mengesahkan kepengurusan baru PPP dalam Surat Keputusan Kemkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

Mengakui Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa masa bakti 2020-2025. Pergantian kepengurusan PPP hanya pada pucuk pimpinan. Di luar itu, tak ada restrukturisasi lain yang dilakukan pada kepengurusan DPP PPP. Cepatnya penerbitan SK Kemkumham ini diklaim tak terlepas dari permintaan Mardiono es.

Mardiono mengatakan Suharso Monoarfa menjadi plt ketua umum atas keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9).

Hal ini bisa mengancam keikutsertaan PPP di Pemilu 2024, seandainya anggota yang mengadu dan mengundurkan diri terjadi dalam jumlah besar. Eksodus besar-besaran bakal membuat jumlah keanggotaan PPP tidak memenuhi syarat minimum yang diatur Undang-undang Pemilu.

Kasetpres Bantah Berita Ada Dokumen Jokowi Bocor di Internet

JAKARTA (IM) - Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono membantah hal itu, Ia memastikan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

memproses secara hukum dan mencari pelakunya," kata Heru.

Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggas oleh salah satu akun Twitter "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembicaraan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.

Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor. Terkait hal ini, Heru meminta kepada penegak hukum untuk memburu peretas dengan identitas Bjorka, karena telah menyebarkan informasi bohong terkait bocor dokumen Presiden Jokowi. ● han

KPAI Desak Ponpes Gontor Dievaluasi terkait Dugaan Penganiayaan Sesama Santri

JAKARTA (IM) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoro kasus kekerasan sesama santri yang menyebabkan satu korban tewas diduga akibat penganiayaan di Pondok Pesantren (ponpes) Gontor, Jawa Timur.

penganiayaan yang diduga menggunakan tongkat/kayu tersebut, anak korban kemudian tewas.

Sebagai Komisioner KPAI, pihaknya mengancam segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan (termasuk Ponpes G) yang mengakibatkan kematian salah satu santri.



FOTO:ANT

PILKADES SERENTAK DI ACEH BARAT

Warga menunjukkan surat suara pemilihan kepala desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchik-sung) atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkaades) serentak di Desa Suak Timah, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Minggu (11/9). Sebanyak 290 desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pemilihan kepala desa periode 2022-2028 secara serentak.

Ketua DKPP Hedy Lugito Siapkan Pengunduran dari Komisaris BUMN

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpilih periode 2022-2027 Hedy Lugito mempersiapkan pengunduran dirinya dari jabatan komisaris independen BUMN PT Sang Hyang Seri (Persero).

dan demokrasi di negeri yang kita cintai ini," jelas Hedy.

Hedy bakal mengirim surat pengunduran resmi dirinya kepada Erick pada hari ini, Senin (12/9) pagi.

Selain sebagai komisaris, Hedy banyak menghabiskan lebih dari 25 tahun berkarir di bidang jurnalistik dan media massa. Ia pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Gatra (2016-2016) merangkap Pemimpin Redaksi Gatranews.com (2012-2016) dan menjadi Sekretaris Jenderal Serikat Perusahan Pers (2009-2017) serta aktif di Forum Pemimpin Redaksi (Pemred). ● mei



FOTO:ANT

OPEN SHIP KRI BIMA SUCI DI SYDNEY
Sejumlah anggota Genderang Suling (GS) Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 tampil di Dermaga Royal Australian Naval Base HMAS Kuttabul Potts Point Sydney, New South Wales, Australia, Minggu (11/9). "Open Ship" tersebut bertujuan untuk memperkenalkan KRI Bima Suci kepada masyarakat Indonesia yang ada di Sydney ataupun Warga Negara Asing (WNA).

Hingga Januari 2022, 600 Politisi Terjerat Kasus Korupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoro tingginya angka korupsi yang menjerat politisi Indonesia.

jika melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Hal itu disambut positif oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sukadiono.

Dua santri lain tersebut kata dia harus di pastikan oleh Kementerian Agama dan jajarannya agar segera mendapatkan haknya untuk rehabilitasi medis dan psikis akibat kekerasan yang dialaminya. ● han

"Kami selaku akademisi, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu sangat senang ketika dilibatkan oleh KPK untuk menjadi bagian dalam mencegah terjadinya korupsi di berbagai bidang yang terlihat di masyarakat, termasuk sektor politik," ujar Sukadiono.

PENGUMUMAN

Bersama ini kami Direksi PT Wijaya Cahaya Timber ("Perseroan") mengumumkan bahwa tindakan konversi hutang menjadi saham yang dilakukan dalam PT Wijaya Cahaya Timber, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Barat telah selesai dilaksanakan dan penerbitan saham baru atas konversi tersebut diambil bagian oleh PT Fortuna Sumber Rejeki, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, sebagaimana Keputusan konversi tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 07 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Frosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi.

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan para pemegang saham PT. Kramatdjadi Sejahtera, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tanggal 3 September 2022 sebagaimana termuat dari akta tanggal 7 September 2022 No.04, dibuat dihadapan L. Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan bahwa sesuatu sehubungan dengan pembubaran tersebut. Kepada pihak-pihak yang keberatan, dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator dengan alamat: Jk. Sultan Iskandar Muda No.9 B, RT.008, RW.001, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, & kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Dijen AHU, Jl. H.R. Rasuna Said Kav-6-7, Jakarta Selatan.